

## PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA BAGI GURU SMK AKUNTANSI SIDOARJO

Retnaningtyas Widuri<sup>1\*</sup>, Yenni Mangoting<sup>2</sup>, Elisa Tjondro<sup>3</sup>, Agus Arianto Toly<sup>4</sup>, R. Arja Sadjiarto<sup>5</sup>

Program Studi Akuntansi Pajak, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi,  
Universitas Kristen Petra, Jl. Siwalankerto 21-131, Surabaya 60236

\*Penulis korespondensi: widuri@petra.ac.id

---

**Abstrak:** Pengelolaan keuangan desa membutuhkan ketrampilan dan kompetensi yang mumpuni dari para perangkat desa. Institusi pendidikan hadir sebagai mitra pemerintah dan sekolah, dalam hal ini SMK, untuk menjawab pemenuhan kebutuhan ketrampilan dan kompetensi tersebut. Sebagai upaya praktis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka dilakukan pelatihan bagi kelompok guru SMK Sidoarjo untuk mata pelajaran Ekonomi dan Akuntansi khususnya materi pengelolaan keuangan desa. Pelatihan ini sekaligus sebagai wadah untuk mempersiapkan para guru dalam mengimplementasikan pembelajaran akuntansi desa dalam kurikulum baru. Metode pelatihan diberikan dalam bentuk diskusi dan tutorial. Dalam diskusi, pengajar memberikan materi awal mengenai pengantar akuntansi untuk pemerintahan dan metode tutorial diberikan dalam bentuk uji coba software akuntansi desa (*open source*). Hasil pelatihan menunjukkan bahwa kemampuan guru memahami akuntansi sudah cukup memadai, namun demikian penguasaan *software* akuntansi desa masih perlu ditingkatkan untuk menunjang pembelajaran akuntansi desa yang akan diberikan kepada siswa dalam bentuk mata pelajaran praktikum akuntansi.

**Kata kunci:** Akuntansi desa, pelatihan guru, aplikasi keuangan desa

**Abstract:** Village financial management requires skills and competencies from village officials. Educational institutions exist as partners for the government and schools to answer the fulfillment of these skills and competency needs. As a practical effort for community service activities, training was conducted for a group of SMK Sidoarjo teachers for Economics and Accounting subjects, especially in village financial management. This training is also a forum for preparing teachers to implement village accounting lessons in the new curriculum. The training method is given in the form of discussions and tutorials. The teacher provides initial material on the introduction of accounting for the government as material for discussion, and tutorial methods are given in village accounting software trials (*open source*). The results of the training show that the teacher's ability to understand accounting material is sufficient. However, mastery of village accounting software still needs to be improved to support village accounting learning provided to students in the form of accounting practicum subjects.

**Keywords:** Akuntansi Desa, teacher training, village finance applications.

---

### PENDAHULUAN

Lingkungan belajar merupakan sesuatu yang melekat pada proses pembelajaran yang dilakukan dan dialami oleh individu dalam keberadaannya sebagai siswa yang mengalami pembelajaran di lingkungan sekolah (Foong & Khoo, 2015). Unsur-unsur lingkungan belajar mencakup semua fasilitas dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran siswa selama masa studi yang mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menciptakan suasana kondusif untuk siswa yang menempati lingkungan pembelajaran tersebut

(Hatane *et al.*, 2020). Keberadaan sarana dan prasarana yang terdapat dalam lingkungan belajar serta kompetensi profesional guru merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan tercapainya proses pembelajaran yang kondusif. Keberadaan guru sangat berperan penting untuk menciptakan kualitas kondisi pendidikan yang kondusif. Untuk mendapatkan pencapaian tersebut, guru perlu diberikan pembekalan kompetensi yang menjadi materi dalam mempersiapkan bahan mengajar sehingga siswa akan termotivasi untuk mengembangkan diri sesuai arahan guru (Rustiana & Chalifah, 2012).

Pembaruan dan adaptasi terhadap perkembangan keilmuan baru sangat penting bagi dunia pendidikan. Pembaruan dan adaptasi tersebut berguna untuk membangun kecakapan siswa atau anak didik sehingga mereka juga adaptif terhadap kebutuhan lingkungan. Termasuk dalam hal tersebut adalah upaya guru SMK melengkapi dirinya dengan kurikulum akuntansi desa sesuai ketentuan yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Modul pelatihan guru dalam aktivitas ini berisi mengenai sosialisasi akuntansi desa yang disesuaikan dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bersumber pada syarat tersebut desa dituntut untuk menyelenggarakan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, handal, efisien serta efektif, terbebas dari tindakan yang merugikan negara (misal korupsi). Selain itu, juga dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang rapi dan teratur, serta mengelola aset desa. Pengelolaan keuangan wilayah juga diatur dalam Permendagri No. 20/2018 hal Pengelolaan Keuangan Desa. Ketetapan tersebut menegaskan bahwa manajemen keuangan desa adalah totalitas aktivitas yang terdiri dari aktivitas merencanakan, menerapkan, mengadministrasi, aktivitas membuat laporan, serta mempertanggungjawaban keuangan desa. Upaya untuk mengimplementasikan akuntansi desa telah dilakukan di beberapa desa di Indonesia, misalnya desa-desa Kecamatan Pariaman Utara, desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dan desa di Kabupaten Kuningan (Pratiwi, Sebrina, & Angelina, 2019; Hanifah & Sugeng, 2015; Puspasari & Purnama, 2018)

Kegiatan ini merupakan tanggapan atas kebutuhan masyarakat sekitar dalam hal ini kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Sidoarjo. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemahaman guru SMK berkaitan dengan implementasi akuntansi desa. Pemahaman guru mengenai implementasi akuntansi desa akan dibutuhkan untuk mengajar sebuah mata pelajaran baru dalam kurikulum SMK, yaitu Akuntansi dan Lembaga Pemerintahan. Dalam pandangan Rakib, Rombe, & Yunus (2017) dan Dewi & Suhardini (2014) pelatihan yang diberikan kepada para guru dapat berdampak pada peningkatan kompetensi guru. Oleh karena itu dipandang perlu untuk memberikan transfer pengetahuan mengenai akuntansi desa sebagai persiapan dan pendalaman kurikulum akuntansi yang akan dipersiapkan sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran.

## METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan dilakukan di Universitas Kristen Petra dalam dua pertemuan.

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tahun 2018 dalam bentuk seminar dengan topik akuntansi dan keuangan lembaga pemerintahan desa. Pertemuan kedua dilakukan pada bulan Oktober tahun 2019 Peserta kegiatan ini adalah kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Sidoarjo. Pelatihan dilakukan mulai jam 10.00 – 15.30 bertempat di Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi Universitas Kristen Petra. Materi pelatihan yang diberikan tidak saja pemaparan mengenai teori dan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan namun juga dalam bentuk workshop menggunakan contoh aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami akuntansi desa, setiap guru diberikan pemahaman awal mengenai konsep akuntansi pemerintahan yang melandasi praktek akuntansi desa. Materi dasar yang diberikan berkaitan dengan sistem keuangan desa meliputi: pengelolaan aplikasi keuangan desa, aplikasi akuntansi dan kode akun, review PPh 22 dan PPN, praktek aplikasi siskeudes.

Para Guru SMK diberikan penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan karakter lingkup penggunaan akuntansi komersil dan akuntansi komersial. Effendi (2020) menjelaskan bahwa prinsip dalam akuntansi komersil diimplementasikan dalam praktek bisnis bertujuan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Sedangkan akuntansi pemerintahan diimplementasikan dalam lingkungan entitas yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sepanjang dana yang ada mencukupi. Dari sisi sumber daya, entitas bisnis memiliki sumber pendapatan dari penyediaan barang dan jasa, sedangkan entitas pemerintah sumber dana berasal dari penarikan pajak.

Dalam pelatihan ini ditegaskan mengenai akuntansi desa dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat. Selain itu, juga dijelaskan mengenai cara menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bersumber pada PP No 71/2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP digunakan sebagai panduan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian, serta pemda mulai dari provinsi, kabupaten, kota serta badan yang bersifat memberikan pelayanan umum (BLU). Penegasan penggunaan prinsip – prinsip akuntansi yang tepat dalam akuntansi pemerintahan, baik yang menerapkan basis akrual maupun basis kas, juga disampaikan dalam pelatihan ini. PP No. 71 menerangkan perbedaan pengakuan pendapatan jika

menggunakan basis akrual atau basis kas. Jika dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran berdasar kas maka jika mendapatkan penerimaan pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan bagi kegiatan pembelanjaan maka diakui pada saat dilakukan pembayaran. Lain hal jika menggunakan dasar akrual dimana dalam mengakui pendapatan adalah berkaitan dengan justifikasi hal penerimaan pendapatan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa pada saat menggunakan dasar akrual maka meskipun secara kas belum diterima, namun jika pendapatan tersebut telah menjadi hak penerima, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai pendapatan. Demikian halnya dengan beban, dapat dicatat saat nilai kekayaan/aset bersih telah menurun walaupun secara pembayaran tunai belum dibayarkan.

Mengacu pada UU No. 6/2014, pengelolaan keuangan desa merupakan suatu wewenang dalam tata kelola desa yang dapat dinilai secara moneter. Selain itu, juga mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa atas pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Desa memiliki beberapa sumber pendapatan yaitu pendapatan yang merupakan hasil asli dari desa (hasil dari usaha, pengembangan aset, swadaya masyarakat); APBN yang diterima desa; bagi hasil PDRD; Dana Desa hasil perimbangan Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari APBD Provinsi; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; Pendapatan Lain-lain. Pengeluaran yang dilakukan untuk Belanja Desa diutamakan untuk kebutuhan pembangunan yang meliputi pelayanan dasar, lingkungan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat Desa. Keberadaan tanah desa, tanah ulayat, pasar (umum dan hewan) ini merupakan aset desa. Jika merujuk kepada karakteristik mata pencaharian utama di sebuah desa, maka beberapa tempat yang berkaitan dengan mata pencaharian utama juga menjadi aset desa, misalnya keberadaan tempat pelelangan ikan, tempat pelelangan hasil bumi/pertanian, dermaga untuk penambatan perahu. Selain itu, pemandian umum, hutan desa juga merupakan contoh aset desa.

Pengelolaan keuangan di desa mencakup pengelolaan pendapatan, belanja dan asset desa, tidak berbeda dengan pengelolaan akuntansi untuk entitas pada umumnya. Menurut PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014, dalam melakukan pengelolaan atau pengaturan keuangan desa menggunakan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah bagaimana merencanakan, dilanjutkan dengan aplikasi dari yang telah direncanakan, penatausahaan, membuat laporan dan memberikan pertanggungjawaban. Satu tahun anggaran yang biasa digunakan dalam keuangan

desa adalah mulai bulan Januari sampai Desember. Laporan yang perlu disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir periode penganggaran adalah laporan yang mencakup pelaksanaan, pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, kekayaan milik desa dan laporan mengenai program yang masuk desa baik dari pemerintah pusat ataupun daerah (Yuliansyah & Rusmianto, 2017).

Pelatihan ini juga memberikan contoh beberapa perkiraan baru yang umumnya digunakan dalam akuntansi pemerintahan seperti ditunjukkan dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Saldo Normal Akun

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
0	Perubahan SAL	√	√
1	Aset	√	
1.1	RK SKPD	√	
2	Kewajiban		√
3	Ekuitas		√
3.1	RK SKPD		√
4	Pendapatan LRA		√
5	Belanja	√	
6	Transfer	√	
7.1	Penerimaan Pembiayaan		√
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	√	
8	Pendapatan LO		√
9	Beban	√	

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010

Sebelum sampai pada penjelasan pengelolaan keuangan desa, dalam pelatihan ini dijelaskan mengenai format penyusunan dan penganggaran keuangan desa seperti ditunjukkan dalam gambar 1.

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Keterangan/ Sumber Dana
1	2	3	4
	<b>PENDAPATAN</b>		
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
	Hasil Usaha		
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	<i>Pendapatan Transfer</i>		
	Dana Desa		
	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah		

**Gambar 1.** Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Sumber: BPKP (2015)

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mengatur lima tahap dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) penatausahaan, 4), dan pelaporan, 5) pertanggungjawaban keuangan desa, dan 6) pembinaan dan pengawasan. Sekretaris Desa bertanggung jawab menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan APBDes tersebut kepada kepala desa.



Untuk memudahkan memahami implementasi akuntansi desa, peserta pelatihan diberikan transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran desa yang kemudian akan diinput dalam aplikasi Akuntansi Keuangan Desa (AKD). Beberapa contoh transaksi desa ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Contoh Input Transaksi-Transaksi

Tanggal	Transaksi
9 Januari	Ditarik uang tunai sebesar Rp 2.000.000 untuk kas operasional bendahara desa dari rekening kas desa yang ada di bank dengan Bukti Bank (BB) No. 001
5 Januari	Diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000 dengan No. Bukti BKM 001
8 Januari	Dikeluarkan SPP No. 001 untuk pembelian alat tulis kantor guna keperluan operasional kantor sebesar Rp 150.000
8 Januari	Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Januari sebesar Rp 2.955.000 dengan No. Bukti BKM 002
9 Januari	Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank Jatim sebesar Rp 7.000.000 dengan Bukti Bank (BB) No. 002
18 Januari	Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Januari sebesar Rp 200.000 dengan No. Bukti BKM 003
19 Januari	Diterima pemajeg (iuran wajib warga) tahun 2017 sebesar Rp 5.625.000 dengan No. Bukti BKM 004
19 Januari	Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank Lampung sebesar 5.000.000 dengan Bukti Bank (BB) No. 003
23 Januari	Dikeluarkan SPP No. 002 untuk pembelian alat dan bahan kebersihan senilai Rp 200.000
24 Januari	Diterima hasil pemungutan atas pembuatan surat-surat desa sebesar Rp 160.000 dengan No. Bukti BKM 005
24 Januari	Dikeluarkan SPP No. 003 untuk pembelian benda pos senilai Rp. 120.000
25 Januari	Ditarik uang tunai sebesar Rp 8.000.000 dari rekening kas desa yang ada di Bank Jatim dengan Bukti Bank (BB) No. 004
25 Januari	Dikeluarkan SPP No. 004 untuk belanja pegawai dengan rincian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp 6.000.000 dan tunjangan sebesar Rp. 2.000.000.

Dalam pelatihan ini, para peserta melakukan input transaksi dalam jurnal umum informasi yang ada dalam bukti-bukti transaksi keuangan baik kas masuk maupun kas keluar. Pengelola keuangan desa menggunakan jurnal khusus seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank sebagai pengganti jurnal seperti telah dijelaskan di atas. Buku kas umum digunakan untuk menyimpan catatan transaksi tunai yang masuk maupun keluar. Buku pembantu berfungsi mencatat aktivitas pemotongan pajak dan penyeteroran pemotongan pajak tersebut ke kas negara. Buku bank dapat digunakan untuk mencatat mutase penyeteroran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank (Yuliansyah & Rusmianto, 2017). Gambar 7 menunjukkan jurnal umum untuk menginput transaksi yang dilakukan oleh aparat desa yang terdapat dalam aplikasi AKD Desa Ciburial.

DAFTAR AKUN		KONTRIBUSI Tanah Kas Desa - LD						
TANGGAL	REK. NO. BUKTI	KETERANGAN	NO. AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT		
13 Jan 2017	AJ 5800	Chirik langka untuk kas operasional bendahara des	1101	Kas di Bendahara Desa	2.000,00	1102	Rekening Kas Desa	2.000,00
15 Jan 2017	AJ 5800	Cherika hasil sewa tanah desa untuk tahun 2015	1101	Kas di Bendahara Desa	5.000,00	5200	Tanah Kas Desa - LD	5.000,00
15 Jan 2017	AJ 5800	Cherika hasil sewa tanah desa untuk tahun 2015	2005	Estimasi Pembelian S/L	5.000,00	4201	Tanah Kas Desa - P/A	5.000,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan operasional	5200	Pembelian Bahan Pabis	150,00	1101	Kas di Bendahara Desa	150,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan operasional	5200	Pembelian Bahan Pabis	150,00	2005	Estimasi Pembelian S/L	150,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Cherika hasil sewa aula desa untuk bulan Januari	1101	Kas di Bendahara Desa	200,00	5200	Kas di Bendahara Desa - LD	200,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Cherika hasil sewa aula desa untuk bulan Januari	2005	Estimasi Pembelian S/L	200,00	4201	Buku Hasil Pembelian Lapangan - P/A	200,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Cherika hasil sewa aula desa untuk bulan Januari	1101	Kas di Bendahara Desa	7.000,00	1102	Kas di Bendahara Desa	7.000,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Cherika hasil sewa aula desa untuk bulan Januari	1101	Kas di Bendahara Desa	200,00	4201	Bangunan Desa - LD	200,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Cherika hasil sewa aula desa untuk bulan Januari	2005	Estimasi Pembelian S/L	200,00	4201	Bangunan Desa - P/A	200,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Cherika pemajeg iuran wajib warga tahun 2017	1101	Kas di Bendahara Desa	5.625,00	4205	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat - LD	5.625,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Cherika pemajeg iuran wajib warga tahun 2017	2005	Estimasi Pembelian S/L	5.625,00	4205	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat - P/A	5.625,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Cherika hasil sewa aula desa untuk bulan Januari	1101	Kas di Bendahara Desa	5.000,00	1102	Kas di Bendahara Desa	5.000,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Cherika hasil sewa aula desa untuk bulan Januari	1101	Kas di Bendahara Desa	200,00	1102	Kas di Bendahara Desa	200,00
18 Jan 2017	AJ 5800	Cherika hasil sewa aula desa untuk bulan Januari	2005	Estimasi Pembelian S/L	200,00	2005	Estimasi Pembelian S/L	200,00

Gambar 7. Jurnal Transaksi

Setelah setiap transaksi diinput dalam jurnal umum atau jurnal khusus, maka peserta pelatihan melakukan proses posting dalam buku besar. Posting dilakukan untuk setiap transaksi keuangan yang telah diinput sebelumnya dalam jurnal umum atau jurnal khusus seperti ditunjukkan dalam gambar 8.

No. Akun		Saldo Awal	
Nama Akun		Saldo Akhir	
11102 Rekening Kas Desa		50.000.000	250.000

  

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1 Jan 2014		SALDO AWAL ...	50.000.000	-	50.000.000
03 Jan 2017	BB001	Ditarik uang tunai untuk kas operasional bendahara	-	2.000.000	48.000.000
09 Jan 2017	BB002	Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank	7.000.000	-	55.000.000
19 Jan 2017	BB003	Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank	5.000.000	-	60.000.000
25 Jan 2017	BB004	Ditarik uang tunai dari rekening kas desa yang ada	-	8.000.000	(8.000.000)
11 Juli 2017	BKM069	Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Juli	250.000	-	(7.750.000)
19 Juli 2017	BB024	Ditarik uang dari rekening kas desa yang ada di Ba	-	12.000.000	(19.750.000)
25 Juli 2017	BB025	Ditarik uang tunai dari rekening kas desa yang ada	-	10.000.000	(29.750.000)
30 Juli 2017	BB026	Rekening kas desa yang ada di Bank Jatim	-	30.000.000	(59.750.000)
TOTAL			62.250.000	62.000.000	250.000

Gambar 8. Buku Besar

Gambar 9 adalah contoh neraca saldo dalam aplikasi AKD Desa Ciburial. Neraca saldo menunjukkan semua akun yang terlibat dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh aparat desa.

AKUN	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
11101	Kas di Bendahara Desa	99.210.000	-
11102	Rekening Kas Desa	250.000	-
11103	Kas di x	-	-
11104	Kas di xx	-	-
11105	Kas Lainnya	-	-
11106	Setara Kas	-	-
11201	Investasi dalam Saham	-	-
11202	Investasi dalam Deposito	-	-
11203	Investasi dalam SUN	-	-
11204	Investasi dalam SBI	-	-

Gambar 9. Neraca Saldo

Informasi dalam gambar 10 adalah salah satu contoh pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa. Laporan Realisasi Anggaran atau LRA. LRA akan menginformasikan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan desa.

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN			
41	PENDAPATAN ASLI DESA			
411	Hasil Usaha Desa	-	3.500.000	-
41101	Kontribusi/Penyisihan dari BUMDesa	-	3.500.000	-
41102	Kontribusi/Penyisihan dari BUMDes	-	-	-
41103	Kontribusi/Penyisihan dari PAB-MC	-	-	-
412	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	-	48.950.000	-
41201	Tanah Kas Desa	-	10.000.000	-
41202	Bangunan Desa	-	35.450.000	-
41203	Jalan Desa	-	2.000.000	-
41204	Lain-lain Kekayaan Milik Desa	-	1.500.000	-
413	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	-	20.445.000	-

Gambar 10. Laporan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan pelatihan Akuntansi Desa berjalan baik dan lancar. Para guru SMK pada dasarnya sudah mendapatkan pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip dalam akuntansi komersial, sehingga adaptasi dalam pembelajaran akuntansi desa tidak mendapatkan hambatan. Gambaran kegiatan terlihat pada gambar 11.



Gambar 11. Suasana Pelatihan



## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pelatihan bagi guru-guru Musyawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK Sidoarjo adalah upaya meningkatkan literasi akuntansi dan keuangan lembaga pemerintahan dalam hal ini desa. Pelatihan bertujuan untuk membekali para guru yang akan mengimplementasikan akuntansi keuangan daerah dalam kurikulum pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Sidoarjo. Materi Akuntansi dan Lembaga Keuangan Pemerintah ini merupakan hal baru untuk para guru sehingga diharapkan apa yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai Akuntansi dan Keuangan Lembaga Pemerintah beserta penggunaan Aplikasi Pengelolaan Sistem Keuangan Desa.

Manfaat penelitian dapat dilihat dari perspektif praktis dan kebijakan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk mempersiapkan siswa-siswa SMK menjadi tenaga kerja siap pakai yang dapat membantu untuk mengimplementasikan akuntansi keuangan desa. Hal ini ditunjang dengan karakteristik kurikulum SMK yang lebih mengedepankan pada kemampuan praktikal. Secara kebijakan, pelatihan ini adalah implementasi dari kebijakan bahwa perguruan tinggi wajib mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Selain itu kegiatan ini adalah implementasi dari kebijakan pemerintah melalui UU No. 6/2014 yang mengatur bahwa desa sebagai entitas mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran secara mandiri dengan mengedepankan karakteristik desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, L., & Suhardini, A. D. (2014). *Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Pelatihan Paikem (Pelatihan Pada Guru MI Dan MTS Di Kabupaten Cianjur)*. Edutech, 13 (3), 409.
- Effendi, Syahril (2020). *Akuntansi Berbasis Akrual Pada Entitas Pemerintah Daerah*. CV Batam Publisher.
- Effendi, Syahril (2020). *Akuntansi Berbasis Akrual Pada Entitas Pemerintah Daerah*. CV Batam Publisher.
- Foong, S.-Y., & Khoo, C.-H. (2015). Attitude, Learning Environment and Current Knowledge Enhancement of Accounting Students in Malaysia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 5(2), 202–221.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Hatane, S. E., Setiono, F. J., Setiawan, F. F., Samuel, H., & Mangoting, Y. (2020). Learning Environment, Students' Attitude and Intention to Enhance Current Knowledge in the Context of Choosing Accounting Career. *Journal of Applied Research in Higher Education*, (2011).
- Pratiwi, R., Sebrina, N., & Angelina, M. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman). *Jurnal Ekplorasi Akuntansi*, 1(1), 139–158.
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145.
- Rakib, M., Rombe, A., & Yunus, M. (2017). Pengaruh Pelatihan Dan Pengalaman Mengajar Terhadap Profesionalitas Guru (Studi Pada Guru Ips Terpadu Yang Memiliki Latar Belakang Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Ekonomi). *Jurnal Ad'ministrare*, 3(2), 137.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Rustiana, A., & Chalifah, N. (2012). Pengaruh Lingkungan Belajar Dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sma N 1 Jekulo Kudus. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 7(1), 14–28.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2017). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2017). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.